

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam H.R. dan Furyanto, Adri Desas 2020, *Teori Hukum Legal Theory*, PTIK Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Arief, Barda Nawawi 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asmara, Galang 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gizjeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaskBang Pressindo, Yogyakarta.
- Book, TM 2018 *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, Santoso R 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami 2006, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Effendy, Marwan 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Farouq S, M 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuady, Munir 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok.
- Jurdi, Fajlurrahman 2017, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul dan Mudawamah 2015, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang.
- HS, Salim dan Nurbani, Septiana Erlies 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*, Rajawali Pers, Depok.
- Ibrahim, Johny 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indonesia, *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo 2019, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Margono 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____ 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Moeljatno 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____ 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mustaqiem 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.

- Nasution, Bahder Johan 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____ 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia 2020, *Perpajakan, Konsep, Sistem dan Implementasi*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Rommelink, Jan 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso, Sani Imam 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan*, Penaku, Jakarta.
- Sari, Diana 2016, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiady, Tolib 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Setyowati, Irma 2000, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul H dan Mukhlis, Imam 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____ dan Mamudji, Sri 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.
- Sudarto 1981, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suteki dan Taufani, Galang 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Tanya, Bernard L 2001, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tim Penyusun 2008, *Executive Tax Program, Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet ABC*, TAF Institute, Jakarta.

Poernomo, Bambang 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Purwoleksono, Didik Endro 2008, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Airlangga University Press, Surabaya.

Yanto, Oksidelfa 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Waluyo, Bambang 1994, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____ 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirawan B., Ilyas dan Richard Burton 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal dan Tesis:

Adriano 2017, 'Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi', *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, April 2017, hlm. 166.

Anindyajati, Titis 2015, 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 6, Desember 2015, hlm. 882.

Budivaja & Bandrio, Y 2010, 'Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya', *Jurnal Hukum*, vol. XIX, no. 19, hlm. 78.

Gujana, Meikel 2019, *Analisis Yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hiariej, Eddy O.S. 2021, Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 1, Maret 2021, hlm. 1.

Imbar, Meggie Regina 'Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Lex Crimen*, vol. IV, no. 1, 2015, hlm. 92.

- Julyano, Mario & Sulistyawan, Aditya Yuli 2019, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Cripido*, vol. I, no. 1, Juli 2019, hlm. 13.
- Meyliana S.K., Devi 2010, *Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 10/Pid.Prap/2008/PN.Jkt.Sel. Dalam Perkara Asian Agri Group)*, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Mihartika, Rini dan Nurhafifah 2017, 'Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 1, no. 1, Agustus 2017, hlm. 146-147.
- Muqaddas, Busyro 2002, 'Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hlm. 21.
- Nursiti dan Fakhrollah 2015, 'Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66, Agustus 2015, hlm. 304.
- Sari, Novita 2017, 'Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 17, no. 3, September 2017, hlm. 353.
- Sarwirini 2014, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak', *Jurnal Yuridika*, vol. 29, no. 3, September – Desember 2014, hlm. 394.
- Susandi 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, Tesis Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Wibowo, Tri 2009, 'Efektifitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 5, no. 3, September 2009, hlm. 210.
- Yoserwan 2020, 'Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 20, no. 2, Juni 2020, hlm. 170.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta;

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 1959, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan “Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84)” Sebagai Undang-undang*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 1981, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 1983, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 2000, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 2007, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 2016, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Jakarta;

Republik Indonesia, Undang-undang 2020, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jakarta;

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1960, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945*, Jakarta;

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 2000, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta;

Mahkamah Agung 1964, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (gijzeling)*, Jakarta;

- Mahkamah Agung 1975, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang Sandera (gijzeling)*, Jakarta;
- Mahkamah Agung 1984, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/pemb/0109/1984 tentang Penegasan Pencairan Kembali Lembaga Sandera (gijzeling)*, Jakarta;
- Mahkamah Agung 2000, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan*, Jakarta;
- Mahkamah Agung 2020, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 1979, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/Pj.4/1979 tentang Penghentian Penggunaan Gijzeling Dalam Penagihan Utang Pajak*, Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 1984, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/Pj.2/1984 tentang Menghidupkan Kembali Gijzeling Dalam Penagihan Utang Pajak*, Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2003, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera*, Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 183 / PMK.03 / 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak*, Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2020, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*, Jakarta;
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2014, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penelusuran Aset*, Jakarta;
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2019, *Pedoman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Jakarta;

Keputusan Bersama 2003, *Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta.

Internet (Website):

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016, *KBBI Daring*, diakses 13 Maret 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Utama*, diakses 16 Juni 2021, <https://pajak.go.id>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Edukasi Pajak*, diakses 16 Juni 2021, <https://edukasi.pajak.go.id>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Pidana Denda Seharusnya Tidak Di Subsider Pidana Kurungan*, diakses 21 Juni 2021, <https://www.pajak.go.id>.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Penelusuran Aset (Asset Tracing)*, diakses 30 Juni 2021, <https://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Aset Tracing & Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses 30 Juni 2021, <https://jurnal.kpk.go.id>.

Surat Kabar:

Hiariej, Eddy O.S. 2018, 'Lex Specialis Dalam Hukum Pidana', *Koran KOMPAS*, 12 Juni 2018, hlm. 7.